



Jurnal Hukum

# MJN

Media Justitia Nusantara

Kajian Mengenai Hak Politik Perempuan Dalam Keterwakilannya  
di Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak di Arena Politik

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek  
Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Kaitannya Dengan  
Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006

Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Paten Sebagai Sarana Alih Teknologi  
Dalam Rangka Penanaman Modal di Indonesia

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore)  
Dari Penyalahgunaan Hak Oleh Pihak Luar Melalui Sui Generis Property System

Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Versi Hukum Tanah Nasional  
(Suatu Kajian Sinkronisasi Antara UUPA, Permen No. 5 tahun 1999 dan  
Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya)

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perjanjian Kerja  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

JMjN

Vol. 1

No. 7

Hal. 1-146

Februari 2014

---

**JURNAL MEDIA JUSTITIA NUSANTARA**

No. 7 Vol. 1 Februari 2014

ISSN : 2085 -8884

**PELINDUNG**

Pembina : Rektor Universitas Islam Nusantara

**PENASIHAT**

Letjen. (Purn) H. Achmad Roestand, SH (Ketua Badan Pengurus YIN)  
Dr. H. Didin Wahidin, MPd (Rektor Uninus)  
Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, SH,MPA (Direktur PPS Uninus)  
Dr. Suhendra Yusuf, MA (Pembantu Rektor I)  
Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata (Asisten Direktur I PPS Uninus)

**Penanggung Jawab**

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, SH,MPA (Universitas Islam Nusantara)  
Prof. Dr. H. Agus Rasas, SH,MS. (Universitas Islam Nusantara)  
Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH,S Sos., LL.M ( UNPAD)  
Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH,MH ( UIN Bandung)  
Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja ( UIN Bandung)  
Dr. H. Mardenis ( Universitas Andalas Padang )  
Dr. Abu Sanmas ( SH,MH ( UIN Maluku)

**KETUA PENGARAH**

Dr. Ir. H. Fontian, SH,MH,ME,CFP

**KETUA PENYUNTING**

Dr.Hj. Imas Rosidawati Wr, SH,MH.

**DEWAN PENYUNTING**

Dr. Sukendar, SH,MH  
Dr. Aslan Noor, SH,MH,CN  
Dr. Irfan Fachrudin, SH,MH.  
Dr. Ir. H. Edy Santoso, MITH, MH.  
Dr. Juli Asri, SH,CN,MH.

**Penyunting Pelaksana**

Sayid M. Rifqi N, SH,MH.  
Andini Anggraeni Kusnadi, ST  
Tansah Rahmatullah, ST

**Produksi dan Sirkulasi**

Wawan Darmawan  
Entis Sutisna

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Uninus  
Jl. Sukarno Hatta No. 530 Bandung 40286 [www.uninus.ac.id](http://www.uninus.ac.id). Email : [mediajustitia\\_nus@yahoo.ac.id](mailto:mediajustitia_nus@yahoo.ac.id)

---

PPs UNINUS Prodi Ilmu Hukum



## DAFTAR ISI

	Halaman
Susunan Redaksi .....	i
Pengantar Redaksi .....	ii
Daftar Isi .....	iii
 Kajian Mengenai Hak Politik Perempuan Dalam Keterwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak di Arena Politik Oleh : Iie Mansoer .....	 1
Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen .....	29
Oleh: Imas Rosidawati WR.	
Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Kaitannya Dengan Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .....	50
Oleh : Nandang Nurdin	
Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Paten Sebagai Sarana Alih Teknologi Dalam Rangka Penanaman Modal di Indonesia .....	66
Oleh : Prima Supriadi Yusuf	
Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional ( <i>Folklore</i> ) Dari Penyalahgunaan Hak Oleh Pihak Luar Melalui <i>Sui Generis Property System</i> .....	87
Oleh: Mohamad Reza	
Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Versi Hukum Tanah Nasional (Suatu Kajian Sinkronisasi Antara UUPA, Permen No. 5 tahun 1999 dan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) .....	107
Oleh : Aslan Noor	
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	128
Oleh : Sukendar	

**HAK ATAS TANAH ULAYAT MENURUT TIGA VERSI  
HUKUM TANAH NASIONAL**  
(Suatu Kajian Sinkronisasi Antara UUPA, Permen No. 5 Tahun 1999  
dan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat  
dan Pemanfaatannya)

Oleh :  
Aslan Noor

*Abstract*

*To maintain the existence of communal land is an effort to protect the existence and the lives of indigenous peoples who are considered not competitive due to the swift pace of development. However, in reality the pace of national development cannot avoid the use of communal land as one of the targets of its place development activity. West Sumatra province which has a lot of communal land that affected by the economic development of the region in the form of plantations, fishery and others investment. It is good to maintain the existence of communal land, but on the other hand a high economic growth are needed to decrease poverty. So, it is necessary to seek a proper concept of secondary rights which will be applied on those communal land which maintain the balance between retaining and utilization.*

*Keywords: Communal Land, Economic Development*

**Abstrak**

Mempertahankan eksistensi tanah ulayat, merupakan proteksi terhadap keberadaan dan kehidupan masyarakat adat yang dianggap belum mampu berkompetitif akibat derasnya laju pembangunan. Namun, dalam situasi konkret, lajunya pembangunan nasional tidak bisa terhindari dari penggunaan tanah ulayat sebagai salah satu sasaran tempat aktivitas pembangunan tersebut. Provinsi Sumatera barat yang memiliki cukup banyak tanah ulayat terkena kawasan pembangunan ekonomi berupa perkebunan, prikanan dan lain-lain sebagai wahan berinvestasi. Mempertahankan tanah ulayat agar tetap eksis disatu pihak, namun dipihak lain dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengentas kan kemiskinan, maka perlu mencari konsep yang tepat tentang hak secunder yang akan diterapkan di atas tanah ulayat tersebut dan bersifat ballances antara mempertahankan dan pemanfaatannya

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Pembangunan Ekonomi

Diterbitkan Oleh  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Uninus

